BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak krisis tahun 1997-1998 banyak perubahan dalam kebijakan ekonomi pemerintah termasuk kebijakan fiskal/kebijakan moneter. Kebijakan moneter pemerintah menerapkan kebijakan yang hanya mempunyai sasaran tunggal dalam jangka panjang yaitu inflasi yang biasa disebut *Inflation Targeting Framework.* Inflasi merupakan fenomena kenaikan atau pelambungan harga barang barang secara terus menerus dan berlangsung dalam jangka panjang. Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi diantaranya yaitu menurut (Montiel, 1989) dalam (Suseno & Aisyah, 2009) mengatakan biasanya inflasi sering terjadi di negara berkembang bersumber dari tingginya defisit anggaran belanja pemerintah sehingga dapat meningkatkan jumlah uang beredar. Kemudian faktor lain yang terjadi dari sisi permintaan berupa kesenjangan perekonomian (*output gap)*, sisi penawaran (perubahan harga barang tertentu seperti BBM yang berdampak kepada harga barang lainnya) dan ekspektasi inflasi. Dampak dari terjadinya inflasi adalah melemahnya daya beli, meningkatnya pengangguran, memburuknya distribusi pendapatan, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat bunga(Susanti, Ikhsan, & Widyanti, 2000).

Inflasi di Indonesia terdapat beberapa jenis yaitu IHPB (Indeks Harga Perdagangan Besar), IHK (Indeks Harga Konsumen), dan GDP Deflator. Bank Indonesia dalam menerapkan ITF (*Inflation Targeting Framework)* menggunakan indikator IHK sebagai perhitungan inflasi.(Setiawan & Zainunnury, 2015)

Tabel I-1 Perkembangan IHK dan Inflasi tahun 2008-2017

TAHUN	IHK	INFLASI
2008	113,86	11,06
2009	117,03	2,78
2010	125,17	6,96
2011	129,91	3,79
2012	135,49	4,3
2013	146,84	8,38
2014	119	8,36
2015	122,99	3,35
2016	126,71	3,02
2017	131,28	3,61

Sumber : BPS, diolah peneliti

Data di atas merupakan data inflasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 dan 2014 inflasi tinggi dialami oleh Indonesia. Dikutip liputan6.com Badan Pusat Statistika (BPS) mencatat bahwa pada pertengahan tahun 2013 tepatnya bulan Juli inflasi Month on Month (MoM) sebesar 3,29% dan Year on Year (YoY) sebesar 8,61% tercatat merupakan inflasi tertinggi sejak 2009. Kontribusi atau penyumbang inflasi tertinggi adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 0,77% diikuti dengan tarif angkutan 0,54%, tarif angkutan udara 0,08% dan tarif angkutan antar kota sebesar 0,07% (Ariyanti, 2013). Selanjutnya terjadi pada bulan November 2014, pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diterapkan oleh pemerintah atas kenaikan Bahan

Bakar Minyak (BBM) sebesar 2000 di prediksi akan menyebabkan inflasi meningkat sebesar 2% dan berlangsung hingga awal 2015. Meningkatkanya inflasi hingga 2% menyebabkan kenaikan harga BBM yang mengakibatkan melesetnya dari target besaran inflasi yang sudah ditetapkan pada tahun 2014 sebesar 4.5%±1% sebelum terjadi harga BBM naik, inflasi sekitar 5%. Dalam mengendalikan inflasi yang terjadi akibat kenaikan harga BBM tersebut BI menaikkan BI rate sebesar 7,75% dari sebelumnya 7,50% padahal Bank Indonesia sudah menetapkan BI rate 7.50% satu minggu sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. *Inflation Targetting Framework* di Indonesia masih belum maksimal penerapannya disebabkan masih adanya hambatan yang dihadapi salah satunya dari kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah seperti terjadi bulan November. Pemerintah menetapkan untuk mengurangi subsidi di sektor BBM alias menaikkan harga BBM. Hal ini (kenaikan harga BBM) tentu akan berdampak kepada barang barang lain seperti bahan kebutuhan pokok juga turut ikut mengalami kenaikan (Setiawan & Zainunnury, 2015)

Sejak masa orde baru hingga orde reformasi, subsidi BBM tidak memberikan manfaat secara menyeluruh akibat dari penyelewengan pemakaian konsumsi bahan bakar antar kelas sosial. Oleh karenanya sejak tahun 2015 subsidi BBM dikurangi dan dana tersebut disalurkan untuk pembangunan produktif serta besarannya tersebar kepada beberapa sektor seperti, sosial, kesehatan, pendidikan dan sektor lainnya. Pada tahun 2017 lalu kebijakan baru mengenai penetapan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga telah resmi

dijalankan. Penetapan tersebut berlaku kepada lokasi 3T dengan maksud mewujudkan Pancasila sila ke-5. Namun, seiring berjalannya program tersebut membuat pihak pengadaan atau produsen yaitu Pertamina harus memperkirakan untuk menangani dan memperkirakan biaya penyaluran serta penetapan satu harga yang akan berdampak kepada pemasukan negara. Jika pelaksanaan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga minyak dunia akan memberikan efek jangka panjang yang akan menyebabkan pembengkakan pengeluaran pemerintah (Iskana, 2017) TribunNews.com.

Penyesuaian anggaran pengeluaran dan penerimaan pemerintah terangkum dalam laporan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Hal ini dibuat dan dilaporkan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang optimal pada suatu negara sebagian besar membutuhkan kondisi defisit atau surplus pada anggarannya, karena setidaknya ada tiga alasan yaitu *pertama,* alat stabilisasi: *kedua, tax smothing: ketiga,* redistribusi intergenerasi. Pada umumnya di negara berkembang dan maju mengadopsi kebijakan defisit anggaran disebabkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, melemahnya nilai rupiah dan pengeluaran berlebih karena inflasi. (Mankiw, 2000)

Pada masa pemerintahan PELITA I hingga PELITA V (1969/1970 – 1997/1998) menganut anggaran berimbang namun sebagian besar mengalami defisit anggaran. Jika dalam anggaran berimbang mengalami defisit anggaran dibutuhkan adanya pembiayaan, pembiayaan baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk hutang ataupun non hutang untuk menutupi

defisitnya. Ada dua kemungkinan yang terjadi bisa terjadi SILPA atau SIKPA. Apabila terjadi SIKPA maka akan mengurangi SAL (Saldo Anggaran Lebih) yang dimiliki pemerintah jika SILPA maka akan menambah saldo bank sentral atau bank bank umum lainnya. Sejak terjadi krisis tahun 1998/1999 *Internasional Monetary Fund (*IMF*)* mendiagnosis penyebab terjadinya krisis 1998/1999 dan memberikan rekomendasi bahwa Indonesia harus mengikuti postur APBN yang digunakan oleh standar yang berlaku pada internasional bahwa APBN harus bersifat transparansi dan akuntabel (Anggaran, 2014).

Setelah perubahan terjadi APBN tahun 2001 dihadapkan dengan tekanan yang cukup berat pelaksanaanya dari sisi politik maupun ekonomi. Dari sisi ekonomi dihadapkan dengan beberapa permasalahan makro yaitu depresiasi nilai rupiah dan suku bunga SBI meningkat yang jauh dari asumsi dasar APBN ditambah dengan kurangnya pembiayaan dari luar negeri karena Bank Dunia & JBIC (*Japan Bank International Cooperation)* membatalkan program pinjaman Indonesia karena tidak dapat memenuhi persyaratan *policy matrix* untuk pencairan pinjaman. Beberapa permasalahan tersebut membuat goncangan terhadap defisit anggaran pemerintah. (Subiyantoro & Riphal, 2014)

Tabel I-2 Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah tahun 2008-2017

TAHUN	PENDAPATAN (milliar)	BELANJA (milliar)	DEF/SURP (milliar)	% PDB
2008	981.609,4	985.730,7	(4.121,2)	0.10
2009	848.763,2	937.382,0	(88.618,7)	1.58
2010	995.271,5	1.042.117,2	(46.845,7)	0.73
2011	1.210.599,7	1.294.999,1	(84.399,4)	1.14
2012	1.338.109,6	1.491.410,2	(153.300,6)	1.86
2013	1.438.891,1	1.650.563,8	(211.672,8)	2.38
2014	1.550.490,8	1.777.182,9	(226.692,0)	2.25
2015	1.508.020,4	1.806.515,2	(298.494,8)	2.59
2016	1.786.225,03	2.082.948,89	(296.723,9)	2.35
2017	1.750.283,40	2.080.451,14	(330.167,7)	2.57

Sumber : Departemen Keuangan, diolah peneliti

Jika dilihat pada tabel diatas perkembangan pendapatan dan pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan dari tahun ketahun diikuti dengan peningkatan defisit anggaran. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi defisit anggaran yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat bunga dan tingkat neraca perdagangan (Kunarjo, 2001). Oleh karenanya pemerintah menetapkan peraturan untuk menjaga terjadinya defisit anggaran. Menurut Undang- Undang Nomor 17 pasal 12 ayat 3 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa ambang batas persentase rasio defisit anggaran sebesar 3% terhadap PDB dan rasio utang luar negeri sebesar 60% terhadap PDB. IMF juga mengatakan bahwa untuk Negara berkembang tatanan ambang batas rasio utang adalah 40% terhadap PDB sedangkan Bank Dunia mengatakan bahwa rasio utang 50% terhadap PDB. (Mas'Udin, 2017).

Pengukuran rasio utang maupun defisit anggaran terhadap PDB lebih bermanfaat dibanding menilai secara absolut. PDB merupakan pengukuran

besarnya ekonomi, dan rasio utang terhadap PDB atau rasio defisit anggaran terhadap PDB merupakan pengukuran besarnya utang/defisit relatif terhadap besarnya ekonomi (Dornbusch, 2008). Dikutip ccnindonesia.com realisasi rasio defisit anggaran pada tahun 2015 dan 2017 meleset dari target. Pada tahun 2015 rasio defisit anggaran mencapai 2,80% yang semula dari target hanya sekitar 1,90% akibat pembiayaan utang dalam negeri(Parospati, 2016). Sedangkan pada tahun 2017 pada triwulan ke-3 rasio defisit anggaran mencapai 2,92% hampir mendekati ambang batas Undang Undang yang telah ditentukan disebabkan karena pengeluaran belanja pemerintah (Fauzi, 2017)

Jika pemerintah menempuh kebijakan defisit anggaran yang artinya pengeluaran lebih besar daripada penerimaannya untuk menutupi pengeluaran pemerintah terdapat empat cara yaitu antara lain mencetak uang, mengambil cadangan mata uang asing, pinjaman luar negeri, pinjaman domestik dengan cara menjual surat berharga kepada masyarakat. Dari empat cara yang sudah disebutkan ada salah satu yang sangat mengawatirkan jika pemerintah menempuh jalan tersebut yaitu mencetak uang untuk menutupi defisitnya karena akan menambah jumlah uang yang beredar dalam waktu cepat yang akan mengakibatkan terjadinya inflasi.(Fischer & Easterly, 2002)

Proses terjadinya inflasi di Indonesia pada tahun 1970-an sebagai akibat munculnya surplus anggaran luar negeri pemerintah (karena digunakan sistem anggaran berimbang, maka berarti pula secara implisit defisit anggaran domestik pemerintah) yang hampir seluruh devisanya dibeli oleh Bank Indonesia sehingga terjadi proses monetisasi. Monetisasi anggaran belanja luar negeri pemerintah

menjadi penyebab bertambahnya jumlah uang yang beredar meningkat sekitar 30%-40% yang menyebabkan tekanan inflasi perekonomian.(Nasution, 1984)

Pada umumnya inflasi terjadi pada fenomena moneter yang terangkum dalam teori kuantitas uang oleh Friedmen menyatakan bahwa "*inflation is always and everywhere a monetary phenomenom"* dimana teori tersebut menjelaskan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap inflasi. Namun, teori tersebut mendapat tentangan dari Leeper (1991), Woodford (1994,1995) dan Sims (1994) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam *penentu harga* melalui *budget constraint* (batasan anggaran) yang terkait dengan kebijakan hutang, pengeluaran dan perpajakan.(Candrono, Sarwedi, & Yuliati, 2015)

Berdasarkan hasil laporan Asian Development Bank (2013) rata rata persentase defisit anggaran dan jumlah uang beredar terhadap PDB pada tahun 2012 di negara negara Asia sebesar 3,9% dan 71,6%. Masing- masing dimana rasio paling tinggi defisit fiskal adalah Pakistan (6,4%), Sri Lanka (6,4%) dan Bangladesh(4,56%) sedangkan M2 terjadi di Malaysia (142%), Thailand (124,8%) dan Vietnam(108.4%). Serta menurut (Candrono et al., 2015) dalam penelitiannya menguji pengaruh defisit anggaran terhadap inflasi di indonesia pada tahun 2001.1 sampai 2013.4 dengan pendekatan *Fiscal Theory of Price Level.* Dalam penelitiannya menyatakan bahwa defisit anggaran berpengaruh signifikan dan negatif terhadap inflasi di Indonesia. Selain itu kebijakan fiskal ekspansi bertujuan untuk membangun infrastruktur belanja dan subsidi dapat mempengaruhi harga secara umum di Indonesia. Hal tersebut membuat peneliti

tertarik untuk meneliti tentang ***"Pengaruh Defisit Anggaran dan Jumlah Uang Beredar terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2001.1-2017.4"***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa "Apakah fenomena inflasi di Indonesia mengarah pada kebijakan fiskal(defisit anggaran) atau kebijakan moneter(jumlah uang beredar) pada tahun 2001.1-2017.4"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran mengenai fenomena inflasi di Indonesia pada tahun 2001 - 2017 terjadi karena fenomena moneter (jumlah uang beredar) atau fenomena fiskal (defisit anggaran)
2. Mengidentifikasi pemecahan masalah untuk menangani fenomena inflasi di Indonesia pada tahun 2001 – 2017 dan tahun selanjutnya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah referensi dan memperluas pengetahuan serta wawasan berfikir tentang defisit anggaran dan jumlah uang beredar serta pengaruhnya terhadap inflasi sehingga dapat menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan, serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam masalah defisit anggaran dan jumlah uang beredar terhadap inflasi.